



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah untuk satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangka Tengah tahun 2023, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis pemerintah daerah.

Selain itu, renja ini juga disusun dengan berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah) tahun 2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Bupati Bangka Tengah.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renja termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renja Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2023.

Koba, Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



Drs. IRWAN, M.Tr.I.P
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19681128 198810 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V. PENUTUP.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA-Perubahan) Tahun 2023mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut,RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakanPembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA Perubahan didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan

RENJA Perubahan SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah aparat pemerintah di bidang ketertiban umum di daerah serta penegakan peraturan daerah dengan wilayah kerja yang mencakup 6 (enam) Kecamatan antara lain: Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk besar, Kecamatan Namang, Kecamatan pangkalan Baru, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan. Dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas dan permasalahan yang sangat beragam, Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah menjabarkan tugas rutin Tahun 2023 dalam Rencana Kerja PerubahanPerubahan Tahun 2023.

Rencana Kerja PerubahanPerubahan Satpol PP Tahun 2023 ini mencakup program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan terinci, juga mencakup kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang memadai yang kesemuanya dibiayai melalui dana APBD Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja, sehingga ketertiban umum dan penegakan Peraturan daerah di wilayah Bangka Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Renja Satpol PP Tahun 2023 ini akan senantiasa mengacu kepada substansi yang tertuang dalam dokumen Renstra, baik yang berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran hingga kebijakan, program dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja Perubahan Perubahan (Renja Perubahan SKPD) adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ” Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD “.
9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023;
3. Agartersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun lalu (2022) dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun. Pada Bab ini memuat review Evaluasi pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun Berjalan. Adapun **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah s.d 2022** dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

No	SASARAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
A		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	%	79.520.513.838	100	11.271.967.932	100	10.412.854.038	95	9.862.941.514	95	95	195	21.134.909.446	194,72	26,58	SATPOL
I	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	100	%	23.623.229.010	100	3.999.698.606	100	3.944.440.210	91	3.601.964.732	91	91	191	7.601.663.338	191,32	32,18	SATPOL
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	100	%	339.000.000	100	51.434.450	-	-	-	-	0	0	100	51.434.450	100,00	15,17	SATPOL
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	25	dokumen	232.000.000	5	38.154.500	-	-	-	-	0	0	5	38.154.500	20,00	16,45	SATPOL
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	25	dokumen	107.000.000	5	13.279.950	-	-	-	-	0	0	5	13.279.950	20,00	12,41	SATPOL
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100	SAP	16.408.575.800	100	2.698.938.587	100	3.284.627.000	90	2.961.548.167	90	90	190	5.660.486.754	190,16	34,50	SATPOL
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	18.579.678.918	56	2.686.808.887	12	3.284.627.000	12	2.961.548.167	100	90	68	5.648.357.054	113,33	30,40	SATPOL
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5	laporan	72.000.000	5	9.180.000	-	-	-	-	0	0	5	9.180.000	100,00	12,75	SATPOL
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5	laporan	52.000.000	5	2.949.700	-	-	-	-	0	0	5	2.949.700	100,00	5,67	SATPOL

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

		SKPD																	
3		AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	PersentasecakupanadministrasikepegawaianPerangkat Daerah	100	%	854.000.000	-	-	100	34.000.000	76	25.900.490	76	76	76	25.900.490	76,18	3,03	SATPOL
1		Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi	jumlahpeserta yang mengikutidiklat formal	50	orang/kegiatan	820.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00	SATPOL
2		PengadaanPakaianDinasBesertaAtributKelengkapannya	JumlahPaketPakaianDinasBesertaAtributKelengkapannya	1	Paket	820.000.000	-	-	1	9.000.000	1	7.571.000	84	84	1	7.571.000	84,12	0,92	SATPOL
3		Bimbingan Teknis ImplementasiOeraturanPerundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikutiBimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	164	orang	820.000.000	-	-	5	25.000.000	4	18.329.490	73	73	4	18.329.490	2,24	2,24	SATPOL
4		AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Persentasecakupanpelayananadminis trasiumum	100	%	1.400.470.000	100	176.041.950	100	172.200.000	100	171.897.563	100	100	200	347.939.513	199,82	24,84	SATPOL
1		PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahbulanpelayan anjasakomunikasi, sumberdaya air, dan listrik	60	bulan	29.630.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100	100	24	6.000.000	40,00	20,25	SATPOL
2		PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlahbulanpelayan anpenyediaanalat tulis kantor	60	bulan	205.040.000	12	24.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	100	100	24	42.000.000	40,00	20,48	SATPOL
2		PenyediaanBahanLogistik Kantor	Jumlahbulanpelayan anpenyediaanmakanan dan minuman	60	bulan	208.000.000	12	31.968.000	12	15.000.000	12	14.772.000	98	98	24	46.740.000	39,70	22,47	SATPOL
4		PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Jumlahbulantersedia nyabarangcetakan dan penggandaan	60	bulan	94.200.000	12	13.746.900	12	10.000.000	12	9.999.850	100	100	24	23.746.750	40,00	25,21	SATPOL
5		Penyediaanbahanbacaan dan peraturanperundang-undangan	Jumlahbulanpenyediaanbahanbacaan dan peraturanperundang-undangan	60	bulan	23.800.000	12	3.546.000	12	1.200.000	12	1.176.500	98	98	24	4.722.500	39,61	19,84	SATPOL
6		PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapatkoordinasi dan konsultasikeluaraer ah yang dilaksanakan	2	Laporan	839.800.000	2	99.781.050	2	125.000.000	2	124.949.213	100	100	4	224.730.263	199,96	26,76	SATPOL
5		PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Persentasecakupanpengadaanbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintah daerah	100	%	1.931.141.000	100	5.000.000	-	-	-	-	0	0	100	5.000.000	100,00	0,26	SATPOL
1		PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	jumlahpengadaanperalatangedungkantor	12	Item	1.931.141.000	22	5.000.000	-	-	-	-	0	0	22	5.000.000	183,33	0,26	SATPOL

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.108.592.000	100	268.042.467	100	219.872.000	98	216.068.437	98	98	198	484.110.904	198,27	43,67	SATPOL
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan pelayanan an jasa surat menyurat	60	bulan	415.400.000	12	142.938.072	12	75.290.000	12	74.417.125	99	99	24	217.355.197	39,77	52,32	SATPOL
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan an jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	bulan	252.300.000	12	66.132.371	12	36.000.000	11	34.342.262	95	95	23	100.474.633	39,08	39,82	SATPOL
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan an jasa administrasi keuangan, Jumlah bulan pelayanan an jasa kebersihan	60	bulan	440.892.000	12	58.972.024	12	108.582.000	12	107.309.050	99	99	24	166.281.074	39,77	37,71	SATPOL
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah pemerintah daerah	100	%	1.894.141.210	100	800.241.152	100	233.741.210	97	226.550.075	97	97	197	1.026.791.227	196,92	54,21	SATPOL
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah bulan pelayanan an Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	Bulan	635.064.705	27	562.432.128	12	67.410.000	12	66.343.875	98	98	39	628.776.003	64,68	99,01	SATPOL
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	45	Unit	1.359.720.000	60	99.250.024	9	123.070.000	9	117.059.700	95	95	69	216.309.724	152,36	15,91	SATPOL
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65	Item	205.394.000	37	61.704.000	13	25.000.000	13	24.944.500	100	100	50	86.648.500	76,88	42,19	SATPOL
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	2.005	M2	261.617.210	49	76.855.000	73	18.261.210	73	18.202.000	100	100	122	95.057.000	6,07	36,33	SATPOL
II	Meningkatnya Keterlibatan dan Keamanan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	%	35.907.617.250	100	7.272.269.326	100	5.385.332.250	97	5.242.618.384	97	97	197	12.514.887.710	197,35	34,85	SATPOL
8		Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	%	11.114.752.450	100	2.909.229.230	100	1.052.280.000	98	1.033.917.170	98	98	198	3.943.146.400	198,25	35,48	SATPOL

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

1		Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Rawan Konflik, Jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Daerah, Jumlah Pencegahan Keamanan dan kenyamanan, Jumlah pengamanan Hari Besar Agama	830	objek kali kegiatan	3.109.896.700	188	568.279.439	166	159.000.000	165	157.833.790	99	99	353	726.113.229	42,50	0,23	SATPOL
2		Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Operasional Penertiban dan Ketertiban Umum, Jumlah Operasi Penertiban Pajak Daerah Non Yustisi	620	kali kali	5.475.195.950	124	730.094.350	124	104.000.000	124	103.679.880	100	100	248	833.774.230	39,94	0,15	SATPOL
3		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah aktif berkoordinasi, Jumlah anggota linmas yang menerima asuransi, Jumlah anggota linmas yang menerima honor	3096	orang orang orang	2.146.720.000	1.389	702.199.750	516	789.280.000	505	772.403.500	98	98	1894	1.474.603.250	61,17	0,00	SATPOL
4		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta linmas yang mengikuti pelsiaga - Jumlah peserta linmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2410	orang orang	328.589.800	1.389	908.655.691	-	-	-	-	0	0	1389	908.655.691	57,63	2,77	SATPOL
5		Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP (beladirimiliter, Senam Tongkat T (Kundun), Penyuluhan Hukum)	15	lembaga	54.350.000	-	-	3	-	-	-	0	0	0	-	0,00	0,00	SATPOL
9	Meningkatnya penerapan perda	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	100	%	24.697.864.800	100	4.343.040.496	100	4.318.052.250	97	4.193.851.148	97	97	197	8.536.891.644	197,12	34,57	SATPOL
1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkadatersosialisasi dan pembinaan	35	Perda	179.280.000	16	59.604.948	6	25.550.000	6	25.489.700	100	100	22	85.094.648	62,82	47,46	SATPOL

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

2		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah anggota Satpol PP yang menerima honor bulanan dan honor piket khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah Jumlah Kepatuhan masyarakat terhadap perda/perkada	3816	orang Perda	19.978.065.000	154	4.244.415.698	636	4.250.102.250	617	4.126.063.357	97	97	771	8.370.479.055	20,22	41,90	SATPOL
3		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Berkas P 21 (lengkap) Jumlah Operasional Penertiban Pajak Daerah Jumlah Penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada	206	Sanksi Kali kali	315.967.550	24	39.019.850	35	42.400.000	35	42.298.091	100	100	59	81.317.941	28,60	25,74	SATPOL
10		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian PERDA/PERKADA	100	%	95.000.000	100	19.999.600	100	15.000.000	99	14.850.066	99	99	199	34.849.666	199,00	36,68	SATPOL
1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Khusus dan Jumlah Rapat Koordinasi	36	Kali	95.000.000	74	19.999.600	6	15.000.000	6	14.850.066	99	99	80	34.849.666	222,06	36,68	SATPOL
III	Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran Secara Dini dan Komprehensif	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pengendalian kebakaran	82	%	19.989.667.578	50	822.511.534	82	1.083.081.578	77	1.018.358.398	94	94	127	1.840.869.932	155,00	9,21	SATPOL
11		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	100	%	19.904.667.578	100	822.511.534	100	1.023.081.578	96	979.044.598	96	96	196	1.801.556.132	195,70	9,05	SATPOL
1		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik rawan kebakaran	378	Titik	570.900.000	63	35.300.000	63	15.000.000	63	14.959.100	100	100	126	50.259.100	33,29	8,80	SATPOL
2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan inspeksi/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara, Jumlah pegawai kontrak pemadam kebakaran	702	Unit Orang-orang kali	2.478.004.828	346	766.551.984	116	942.798.828	111	905.666.098	96	96	457	1.672.218.082	65,16	67,48	SATPOL

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

			an																
3		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi	180	Kejadian	17.664.978.828	35	20.659.550	30	50.282.750	30	49.989.550	99	99	65	70.649.100	36,01	0,40	SATPOL
4		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasi	72	Kejadian	83.300.000	-	0	10	15.000.000	6	8.429.850	56	56	6	8.429.850	7,81	10,12	SATPOL
5		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Alat Pelindung Diri	Jumlah kegiatan operasi	72	Kejadian	138.300.000	-	0	10	70.000.000	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	SATPOL
12		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100	%	30.000.000	-	-	100	30.000.000	97	29.224.100	97	97	97	29.224.100	97,41	97,41	SATPOL
1		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Terpeliharanya Alat Pemadam Api Ringan Proteksi Kebakaran	120	Badan Usaha/Instansi/Perusahaan	15.000.000	-	-	20	15.000.000	20	14.949.850	100	100	20	14.949.850	16,61	99,67	SATPOL
2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Alat Proteksi Kebakaran	120	Unit	15.000.000	-	-	20	15.000.000	19	14.274.250	95	95	19	14.274.250	15,86	95,16	SATPOL
13		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100	%	15.000.000	-	-	100	15.000.000	17	2.600.000	17	17	17	2.600.000	17,33	17,33	SATPOL
1		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah frekuensi investigasi	170	Kali	15.000.000	-	-	70	15.000.000	12	2.600.000	17	17	12	2.600.000	7,14	17,33	SATPOL
14		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pengendalian kebakaran	100	%	40.000.000	-	-	100	15.000.000	50	7.489.700	50	50	50	7.489.700	49,93	18,72	SATPOL
1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan	18	Kali	40.000.000	-	-	3	15.000.000	1	7.489.700	50	50	1	7.489.700	8,32	18,72	SATPOL

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditentukan NSPK dan SPM. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Berdasarkan data yang ada dapat kita ketahui berapa banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari – hari.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci masing-masing indikator utama menurut sasaran strategisnya, indikator kinerja program dan target pencapaian yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel berikut ini . (**Tabel II.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah s.d 2021**):

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangka Tengah

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM	IKK	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				2016 (n-2)	2017 (n-1)	2018 (thn n)	2019 (thn n+1)	2020 (thn n+1)	2016 (thn n-2)	2017 (thn n-1)	2018 (Thn n)	2019 (Thn n+1)	2020 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Persentase Penurunan gangguan Ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan Masyarakat			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	6,87 %	6,56 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada			7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	6.38 %	7.57 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	
3	Tingkat waktu tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	√		75 %	77 %	80 %	82	82	n/a	79.07 %	80 %	82 %	82 %	
INDIKATOR KINERJA														
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) di Kabupaten / Kota	√		97%	98%	99%	99%	99%	90,2 %	99,12 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	
2	Cakupan penegakan PERDA / PERKADA	√		87%	89%	90%	92%	92%	75,76 %	90,16 %	90,00 %	92,00 %	92,00 %	
3	Cakupan Patroli SATPOL PP	√	-	Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan	Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan	Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan	Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan	Patroli 3kali sehari dalam satu kecamatan	Patroli 3 kali sehari dalam satu kecamatan					
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di kabupaten/Kota	√	-	0,61 linmas/RT	0,68 linmas/RT	0,75 linmas/RT	0,82 linmas/RT	0,82 linmas/RT	0,61 linmas/RT	0,61 linmas/RT	0,61 linmas/RT	0,82 linmas/RT	0,82 linmas/RT	
5	Cakupan pelayanan kebakaran	√	-		33 %	33 %	50 %	50 %		27.89 %	33 %	50 %	50 %	

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan isu – isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan).

Identifikasi keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan tujuan, sasaran, dan strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan tantangan sebagai berikut:

RENJA Perubahan 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

MATRIK ANALISIS KETERKAITAN ANTARA FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;	1. Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan disiplin dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Linmas;
	2. Adanya sistem pembagian kerja yang baik dan manajemen operasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan lapangan ;	2. kurang berkualitasnya SDM, banyaknya anggota Satpol PP dan anggota LINMAS yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS, diklat Satpol PP dan diklat LINMAS;
	3. Cepat tanggapnya sikap Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat	3. Sarana dan prasarana kegiatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah;
	4. Tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan staf maupun anggota Polisi Pamong Praja	4. Masih kurangnya komunikasi yang efektif antara Satpol PP dengan masyarakat;
5. Adanya komitmen aparatur untuk melaksanakan tugas dengan baik	5. Adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi, kurangnya anggota SATPOL PP dan tidak adanya PPNS;	
		6. Terbatasnya dana operasional dan pemberian reward yang kurang memadai.
		7. Peralatan penanggulangan bencana masih minim
PELUANG (O)	STRATEGI (S – O)	STRATEGI (W – O)
1. Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kebijakan nasional dalam mendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja;	1. Meningkatkan profesionalisme Aparat Polisi Pamong Praja guna mendukung tugas-tugas teknis administratif, teknis yuridis dan teknis operasional	1. Mengadakan sosialisasi PERDA maupun Kepala Daerah terhadap masyarakat secara intens dan berkala,
2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat serta semangat reformasi;	2. Mengembangkan Program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	2. Meningkatkan kualitas SDM Polisi Pamong Praja dan anggota LINMAS melalui pembinaan, pendidikan maupun Bimbingan teknis lainnya
3. Semakin demokratisnya kehidupan masyarakat;	3. Melakukan konsultasi kegiatan secara lebih intens dengan unsur pimpinan dalam mengoperasionalkan kegiatan	3. Merekrut staff baru yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan
4. Terjalannya hubungan dengan kepolisian, TNI, LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komponen masyarakat lainnya;	4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat, aparat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam menciptakan suasana tertib, tentram, damai dan tegaknya supremasi perda serta tanggap terhadap terjadinya bencana.	4. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja,
5. Tingginya kesadaran sikap dan komitmen masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;		5. Mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional,
6. Besarnya keinginan masyarakat untuk hidup rukun, tertib, tentram, aman, dan damai.		
7. Indeks Resiko Bencana yang relatif rendah		
TANTANGAN (T)	STRATEGI (S – T)	STRATEGI (W – T)
1. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi (Pengaruh negatif dari globalisasi) ;	1. Memberi pemahaman terhadap warga masyarakat dan membantu mencari solusi dalam penanggulangan tambang inkonvensional illegal dan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, prostitusi dan perjudian	1. Peningkatan kualitas & profesionalitas aparat Polisi Pamong Praja dan LINMAS melalui Pendidikan & pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat & menekan terjadinya pelanggaran PERDA,
2. Adanya tuntutan yang semakin meningkat terhadap kinerja Satpol PP di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan PERDA;	2. Meningkatkan pelaksanaan operasional untuk mengembalikan fungsi peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah	2. Peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja SATPOL PP
3. Image negatif masyarakat terhadap Polisi Pamong Praja dan memandang rendah terhadap tugas LINMAS;	3. Meningkatkan sosialisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat Penegak PERDA dan tugas anggota LINMAS,	3. Meningkatkan Koordinasi, pendataan dan evaluasi untuk mendapatkan data tentang pelanggar PERDA
4. Kurangnya dukungan lembaga sosial politik local dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan;	4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi pemerintah dan non pemerintah sampai ke tingkat ke bawah.	4. Mengadakan penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja, TIM Reaksi Cepat dan Tim Pemadam Kebakaran hingga mencapai jumlah memadai terhadap cakupan wilayah,
5. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan tupoksi;	5. Meningkatkan jalinan koordinasi aparat di tingkat lapangan	5. Meningkatkan operasi-operasi penertiban.
7. Perekonomian masyarakat yang lemah sehingga tingginya angka pengangguran		
8. Masyarakat tidak puas dengan dengan hasil PILKADA/kebijakan Pemerintah		
9. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah (Disaster awareness);	6. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi bencana.	

Dari analisis di atas, Sejumlah isu – isu strategis prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun yang akan datang terkait dengan tantangan, masalah, dan beban pekerjaan yang akan ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS, Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan Tim Damkar yang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap perda / perkara yang berlaku;
3. Maraknya peredaran minuman ilegal, reklame yang tidak sesuai peraturan yang berlaku ;
4. Kurangnya jumlah sumber daya anggota Satpol PP PNS, satlinmas, Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan Tim Damkar;
5. Kurangnya potensi satlinmas;
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
7. Semakin meningkatnya potensi bencana sebagai akibat ancaman kerusakan lingkungan.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah pada TA 2023 akan melaksanakan Program dan kegiatan Serta Sub Kegiatan SATPOL PP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 24 Sub kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.7 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1.7.1 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD

1.7.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

2.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

2.1.2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

2.1.3 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Bupati

2.2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.2.2 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.2.3 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2.3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

2.3.1 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, adapun kegiatan tersebut antara lain :

3.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3 Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

3.1.4 Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Kegiatan Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

3.2.1 Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

3.2.2 Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

3.3 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

3.3.1 Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

3.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

3.4.1 Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 untuk sumber dana APBD Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Daerah	INDIKATOR	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023					Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu APBD Induk 2023	Pagu Indikatif Perubahan 2023	Bertambah / Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				10.406.197.000	11.127.773.000	721.576.000	
I.I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	NILAI SAKIP OPD	Satuan Polisi Pamong Praja	79	4.311.979.000	4.693.479.000	381.500.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase cakupan pelayanan administrasi umum	Kabupaten Bangka Tengah	100%	40.000.000	40.000.000	-	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangka Tengah	5 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangka Tengah	5 Laporan	10.000.000	10.000.000	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan	Kabupaten Bangka Tengah	100%	3.445.497.000	3.445.497.000	-	
a	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bangka Tengah	32 Orang/bulan	3.432.497.000	3.432.497.000	-	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bangka Tengah	2 Laporan	8.000.000	8.000.000	-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Bangka Tengah	100%	25.000.000	45.000.000	20.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bangka Tengah	5 orang	25.000.000	25.000.000	-	
b.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	-	20.000.000	20.000.000	

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Kabupaten Bangka Tengah	100%	172.200.000	174.200.000	2.000.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	3.000.000	5.000.000	2.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	18.000.000	18.000.000	-	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	15.000.000	15.000.000	-	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	10.000.000	10.000.000	-	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Bangka Tengah	2 Laporan	125.000.000	125.000.000	-	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bangka Tengah	100%	220.112.000	220.112.000	-	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	75.290.000	75.290.000	-	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	12 laporan	36.000.000	36.000.000	-	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	108.822.000	108.822.000	-	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Bangka Tengah	100%	-	322.000.000	322.000.000	-
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	-	147.000.000	147.000.000	
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang disediakan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	-	175.000.000	175.000.000	
7	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Kabupaten Bangka Tengah	100%	-	17.500.000	17.500.000	-
a.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	-	10.000.000	10.000.000	
b.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	-	7.500.000	7.500.000	

8	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentasecakupanpengadaaanbarangmilikdaerahpenuhngurusanpemerintahdaerah	Kabupaten Bangka Tengah	100%	409.170.000	429.170.000	20.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan	JumlahkendaraanPerorangan dinasataukendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayarkanpajaknya	Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	67.410.000	67.410.000	-	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraanDinas OperasionalatauLapangan	Jumlahkendaraandinasoperasionalataulapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan perizinanya	Kabupaten Bangka Tengah	7 Unit	311.760.000	311.760.000	-	
c	PemeliharaanPeralatanmesinLainnya	Jumlahperalatan dan mesinlainnya yang dipelihara	Kabupaten Bangka Tengah	13 Item	20.000.000	20.000.000	-	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlahgedungkantor dan bangunanlainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	10.000.000	30.000.000	20.000.000	
I.2	Program Peningkatanketenteraman dan KetertibanUmum	PersentaseGangguanTrantibum yang dapatdiselesaikan	SatuanPolisiPamong Praja	100%	5.144.332.000	5.482.408.000	338.076.000	-
9	PenangananGangguanKetertiban dan KetertibanUmumdalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	JumlahGangguan Rawan Konflik, JumlahOperasiPengamanan dan PengawasanPejabat Daerah, JumlahPencegahanKeamanan dan Jumlahkenyamanan	Kabupaten Bangka Tengah	100%	969.280.000	1.078.156.000	108.876.000	-
a	PencegahanGangguanKetenteraman dan KetertibanUmummelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, dan Pengawasan	JumlahKasusGangguanketenteraman dan ketertibanumum yang dicegahmelaluideteksidini dan cegahdini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaanpatroli, pengamanan dan pengawasan	Kabupaten Bangka Tengah	122 kasus	90.000.000	120.000.000	30.000.000	
b	PenindakanatasGangguanKetenteraman dan KetertibanUmumBerdasarkanPerda dan PerkadamelaluiPenertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlahkasusgangguan ketenteraman dan ketertibanumberdasarkanperda dan perkadamelaluipenertiban dan penangananunjuk rasa dan kerusuhanmassa yang dilakukapenindakan	Kabupaten Bangka Tengah	60 kasus	90.000.000	90.000.000	-	
c	PemberdayaanPerlindungan Masyarakat dalamrangkaKetenteraman dan KetertibanUmum	Jumlahdokumen yang memuathasilpemberayaanperlindunganmasyarakatdalamrangkaketenteraman dan ketertibanumum	Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	789.280.000	868.156.000	78.876.000	
10	PenegakanPeraturan Daerah Kabupaten / Kota dan PeraturanBupati / wakil Bupati	PersentasePerdaPerkada yang di tegakkan	Kabupaten Bangka Tengah	100%	4.160.052.000	4.389.252.000	229.200.000	-
a	SosialisasiPenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota	Jumlahlaporanhasilpelaksanaan sosialisasi penegakanperda/perkada kepadamasyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Kabupaten Bangka Tengah	6 laporan	25.550.000	25.550.000	-	

b	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan bupati/walikota	Kabupaten Bangka Tengah	5 Laporan	4.092.102.000	4.321.302.000	229.200.000	
c	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Kabupaten Bangka Tengah	5 Laporan	42.400.000	42.400.000	-	
11	PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL (PPNS)	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	Kabupaten Bangka Tengah	100%	15.000.000	15.000.000	-	
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Kabupaten Bangka Tengah	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	
1.3	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pengendalian Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	949.886.000	951.886.000	2.000.000	-
12	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kebakaran, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	100%	889.886.000	891.886.000	2.000.000	
a	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	32.566.000	32.566.000	-	
b	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bangka Tengah	4 Laporan	777.320.000	779.320.000	2.000.000	
c	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan/evakuasi saat penanganan kebakaran dan non kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	2 Dokumen	65.000.000	65.000.000	-	
d	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengenalan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
13	Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pengendalian Kebakaran, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Rate Time) wilayah Kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	100%	30.000.000	30.000.000	-	

a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	20 Pelaku Usaha	15.000.000	15.000.000	-	
b	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kriteria standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	20 Unit	15.000.000	15.000.000	-	
14	Investigasi Kejadian Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota, Tingkat Waktu Tanggap Respon Rate Time wilayah Kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	100%	15.000.000	15.000.000	-	
a.	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian dan penelitian	Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	
15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota, Tingkat Waktu Tanggap Respon Rate Time wilayah Kebakaran	Kabupaten Bangka Tengah	100%	15.000.000	15.000.000	-	
a.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbinarelawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kabupaten Bangka Tengah	6 Desa/Kelurahan	15.000.000	15.000.000	-	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai dengan yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib bagi setiap daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan Satpol PP merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri, serta dibutuhkan dalam tatanan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten.

Begitu pula dengan Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki fungsi dan tugas sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal melaksanakan tugasnya Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah harus memiliki rencana strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang dibuat sebagai tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah di bidang ketertiban dan ketentraman berdasarkan skala prioritas yang pelaksanaannya berkesinambungan sehingga dapat menciptakan kondisi kehidupan yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

Sasaran yang ingin ditempuh dalam penyusunan Renstra ini adalah Tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah terciptanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, terlaksananya pengawasan terhadap disiplin kinerja pegawai, serta terkoordinirnya pengawasan serta pengamanan kantor, rumah kepala daerah, serta rumah pejabat lainnya, terciptanya hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain dalam menciptakan kondisi yang kondusif, dan terlaksananya pelayanan pengamanan dan pengawasan yang baik.

Sedangkan Indikatornya adalah jumlah Tambang Inkonvensional Ilegal, jumlah penyakit masyarakat (pekat) seperti miras, judi, pelacuran, dan lain-lain, jumlah izin usaha yang ilegal seperti walet, reklame, maupun IMB, dan lain-lain,

jumlah Pegawai berada diluar jam kerja, jumlah anak sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah, jumlah laporan dari masyarakat, jumlah pedagang kaki lima yang melanggar Perda, Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas, jumlah Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dan jumlah pengamanan di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.

Sehingga pada akhirnya penyusunan Renstra ini sangatlah penting, karena dengan adanya Renstra ini, kita dapat mengukur kemampuan dan kualitas daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.2. Saran

Adapun saran dalam melaksanakan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Diharapkan agar adanya kerjasama yang intens dan berkelanjutan antara Satpol PP dengan maupun dinas-dinas lainnya, baik dinas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah maupun yang diluarnya.
2. Diharapkan masyarakat Bangka Tengah dapat bekerjasama dengan Satpol PP dalam hal penegakan ketertiban dan keamanan.
3. Diharapkan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja Satpol PP.

KOBA, Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



Srs. IRWAN, M.Tr.I.P

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19681128 198810 1 001